

## **JEJAK-JEJAK KOLONIAL DI BINONGKO**

**Oleh :**

**Hasaruddin, S.Pd.,M.Hum**

(Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan Baubau)  
(uhasar01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Binongko merupakan saah satu wilayah di gugusan kepulauan tukang besi yang saat ini dikenal dengan nama kabupaten Wakatobi. Pulau Binongko pada masa silam merupakan salah satu daerah di wilayah kesultanan Buton, yang memproduksi rempah-rempah khususnya cengkeh dan pala. Posisi binongko yang sangat strategis yang merupakan salah satu jalur pelayaran yang menghubungkan dari arah timur ke arah barat Nusantara ataupun sebaliknya memungkinkan wilayah ini menjadi tempat persinggahan. Disamping itu keberadaan cengkeh dan pala yang merupakan komoditas perdagangan internasional pada zamannya menjadikan pulau Binongko menjadi sasaran para pedagang khususnya bangsa Eropa. Kesepakatan antara Buton dan Belanda menjadikan komoditas cengkeh dan pala di Pulau Binongko menjadi daya Tarik Belanda untuk berada di Pulau Binongko sehingga meninggalkan jejak-jejak keberadaann bangsa Belanda.*

**Kata Kunci : Jejak, Kolonial, Binongko**

### **I. PENDAHULUAN**

Buton merupakan salah satu pulau terbesar di jazirah selatan/ tenggara Sulawesi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton juga merupakan salah satu kerajaan terbesar maka sangat rentan dari berbagai guncangan keamanan

akibat dari serangan pihak-pihak luar yang ingin menghancurkan masyarakat maupun kedaulatan kerajaan. Schoorl (2003: 3) menyatakan dokumen Barat menjelaskan bahwa Buton terletak di titik strategis pada rute dari Jawa dan Makassar ke Maluku, pusat produksi rempah-rempah Indonesia. Lebih lanjut Schoorl (2003: 15), menyatakan bahwa Kesultanan Buton merupakan gugusan kepulauan di daerah Sulawesi Tenggara. Ia terdiri dari pulau-pulau Buton, Muna, Kabaena dan gugusan pulau Tukang Besi, dan selanjutnya daerah-daerah Rumbia dan Poleang yang terletak di semenanjung Tenggara Sulawesi.

Dalam metafora perahu, yang juga dapat berarti kondisi sesungguhnya, “barata Buton” terombang ambing tiada menentu. Ke arah haluan (*rope*) Buton menghadapi ancaman Gowa sedangkan ke arah buritan (*wana*) harus berhadapan dengan ancaman Ternate. Dalam ketegangan terus menerus itulah, kehadiran VOC yang “membebaskan” Buton dari ancaman dan bahkan serangan armada kuat Gowa beberapa kali dilakukan dalam dekade pertengahan abad ke- 17. (Zuhdi, 2010: 2)

Setelah Bangsa Portugis, kehadiran VOC/ Belanda di Buton sejak 5 Januari 1613 memberi warna tersendiri bagi dinamika sejarah Buton. Kehadiran Belanda di Kesultanan Buton diterima secara baik sebagai suatu strategi politik dalam negeri. Sultan Buton yang berdasarkan nilai-nilai budaya dalam bidang politik yang telah memberikan tempat akan kehadiran Belanda. Dimata petinggi-petinggi Kesultanan tidak ada niat melakukan perlawanan terhadap Belanda, karena telah diketahui sebelumnya bahwa Belanda secara umum mempunyai persiapan yang matang dalam segi persenjataan. Demikian dengan terlaksananya ikatan perjanjian antara Buton dan Belanda ini banyak didorong oleh berbagai pertimbangan antara lain bahwa Kesultanan Buton pada saat itu tidak ingin berkonfrontasi dengan Belanda, karena dibidang teknik, sosial, *man power* dan pertahanan belum kokoh. Di samping itu juga Buton masih terkonsentrasi pemikirannya terhadap ancaman akan munculnya serangan dari berbagai kerajaan sekitarnya yaitu dari Ternate maupun Gowa. Dengan melihat kondisi dan situasi inilah para petinggi Kesultanan menetapkan untuk menerima dan mengadakan perjanjian antara Buton dengan Belanda.

Setelah itu Belanda melakukan perdagangan dan menanamkan pengaruh politiknya untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, maka wilayah Kesultanan Buton yang menjadi jalur pelayaran dan salah satu pusat perdagangan tidak lepas dari intaian Belanda yang berusaha memaksakan politik dagangnya dibawah bendera VOC. Belanda menyadari bahwa Buton merupakan pintu ke Maluku. Dalam perjalanan dari dan ke Jawa sebagai pusat niaga pelayar-pelayar Belanda melewati perairan wilayah Kesultanan Buton dan singgah di Buton untuk mengambil tambahan pembekalan. Salah satu wilayah kesultanan Buton adalah kepulauan Tukang besi (sekarang disebut Wakatobi).

Kepulauan Wakatobi masuk dalam wilayah Kesultanan Buton yang membentang di bagian timur Pulau Buton. Pada masa Kesultanan Buton dinamakan Liwuto Pataanguna, artinya Pulau Empat, kemudian dipopulerkan dengan istilah Liwuto Pasi, artinya Pulau Karang. Sejak Belanda berkuasa di Buton, gugusan kepulauan ini disebut dengan istilah Toekang Besi Eilanden artinya Kepulauan Tukang Besi. Wilayah ini sangat penting karena menjadi salah satu tempat persinggahan. Dalam tradisi lisan menuturkan bahwa istilah itu mula-mula dilontarkan oleh seorang Belanda bernama Hoger. Versi lain menyebutkan bahwa istilah Tukang Besi berasal dari nama Tulukabessi Raja Hitu, yang para pengikutnya diasingkan ke Batavia tetapi berhasil memberontak dan membunuh para serdadu Belanda di Pulau Wangi-Wangi.

Pulau paling selatan (tenggara) dari gugusan Kepulauan Tukang Besi adalah pulau Binongko. Perairan Kepulauan Tukang Besi, meskipun di beberapa tempat dapat disinggahi untuk mengambil perbekalan air dan beristirahat, juga diketahui berbahaya. Pulau di antara gugusan yang dimaksud itu adalah Binongko. (Zuhdi, 2010: 41). Posisi pulau yang lepas dari daratan besar, baik pulau Sulawesi dan pulau Buton, menjadikan pulau atau wilayah ini menjadi tempat persinggahan sebelum ke Maluku.

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka penulis mengangkat judul yaitu tentang Jejak-jejak Kolonial Belanda di Binongko. Belanda sebagai salah satu negara imperiaalis tentu meninggalkan sejumlah jejak sebagai bukti akan keberadaan mereka di wilayah tersebut.

## **II. METODELOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian historis dengan pendekatan deskripsi-kualitatif yang bermaksud memberi gambaran secara terperinci mengenai jejak-jejak kolonial Belanda di Binongko. Untuk mendeskripsikan tentang jejak-jejak kolonial Belanda, maka dilakukan penelitian lapangan dalam mendapatkan data yaitu data primer dan data sekunder.

### **B. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini dengan bersumber pada orang-orang atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki informasi awal dalam melakukan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder adalah data yang sudah ada campur tangan dari peneliti sejarah dalam memperlakukannya sebagai bahan sumber untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Data sekunder ini dapat berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah dan sebagainya. (Rahman Hamid, 2011: 17)

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian sejarah, metode yang digunakan adalah metode sejarah. Urutan atau tahapan dalam metode sejarah lebih lanjut dikemukakan Gottschalk (1986) dalam Rahmad Hamid (2011: 42-43) sebagai berikut :

(1) pengumpulan objek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan, (2) menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik, (3) menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan otentik, dan (4) menyusun kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja, yaitu:

- 1) Heuristik (pengumpulan sumber)
- 2) Kritik sumber (eksternal/ bahan dan internal/ isi)

- 3) Interpretasi (penafsiran), dan
- 4) Historiografi (penulisan kisah sejarah). (Rahman Hamid, 2011: 42- 43)

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini dilakukan melalui prosedur atau tahapan kerja sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dengan kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan (*library study*), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelaah beberapa buku/ literatur, skripsi, majalah serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan.
- b) Studi lapangan (*field study*), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Pengamatan (*observation*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang obyek penelitian.
  - 2) Wawancara (*interview*), dalam teknik ini menggunakan wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab antara peneliti dengan para informan. Informan yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang dianggap mengetahui tentang adanya jejak-jejak Kolonial Belanda di Binongko.
  - 3) Studi dokumentasi, yaitu mencari dan mengkaji sejumlah dokumen sejarah dalam bentuk arsip yang berhubungan dengan adanya jejak-jejak Kolonial Belanda di Binongko.

#### 2. Kritik sumber

Kritik adalah suatu teknik analisis untuk menentukan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber yang telah dikumpulkan, baik bentuk maupun isinya. Semua sumber yang telah dikumpulkan diverifikasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Kritik ekstern, dilakukan untuk menilai otentitas (keaslian) sumber data yang didapatkan.
- b. Kritik intern, dilakukan untuk menilai kredibilitas (kebenaran) isi sumber data yang diperoleh.

### **3. Interpretasi**

Pada tahap ini diberikan interpretasi atau penafsiran subyektif mungkin dengan cara menghubungkan data-data yang telah diperoleh dan telah dikritik sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian sejarah. Pada tahap ini hasil penelitian disusun secara sistematis dan kronologis sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **D. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis datanya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni data-data yang diolah kemudian disusun secara deskriptif sehingga menjadi jelas dan dapat dimengerti serta dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **III.. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi masyarakat Binongko pada masa kolonial Belanda**

Kondisi masyarakat dunia pada saat dijajah pasti sangat terpuruk. Sama halnya dengan masyarakat Binongko pada masa Kolonial. Menurut narasumber (La Rabu Mbaru) Pada masa pemerintahan Sultan ke 33 Muhammad Asyikin, banyak orang yang hijrah akibat kekerasan Kolonial Belanda dengan kerja paksa (Rodi/ hardinsi dalam bahasa Binongko) dalam pembuatan jalan keliling Pulau Binongko dan ada juga kerja paksa penggalian aspal Buton di Kabongka Buton. Saat itu, masyarakat Binongko sangat terpuruk karena banyak yang

mengalami kematian akibat kerja keras, kelaparan dan penindasan dari penjajahan Belanda.

Berdasarkan informasi dalam lingkungan Masyarakat, mereka banyak yang menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tentara kolonial. Kondisi masyarakat Binongko sangat terpuruk pada masa itu, untuk menghindari kekejaman tentara Belanda itu sebagian orang menyingkir ke tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain yang dianggap aman. Seperti halnya para korban perang yang mencari tempat aman untuk menyambung hidup. Saat itu banyak orang Binongko yang berhijrah ke NTT, NTB, Maluku, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung maupun ke Banda Naira. Demi menyambung hidup, orang-orang Binongko rela meninggalkan tanah kelahirannya.

Kekuasaan Belanda di Buton membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat lokal, khususnya di Binongko. Dengan adanya tanam paksa atau kerja rodi ini, sebagian masyarakat Binongko meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan diri dari tentara kolonial. Daerah-daerah yang menurut mereka aman salah satunya adalah di NTT, sebagian orang Binongko yang melarikan diri dan hingga sekarang mereka sudah menetap di sana.

## **2. Jejak-jejak peninggalan kolonial Belanda di Binongko**

Kedatangan bangsa barat terutama bangsa Belanda di Indonesia telah membuka lembaran sejarah baru bagi Bangsa Indonesia untuk masuk ke zaman kolonialisme. Pada masa tersebut telah terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang pernah di terapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang membawa pengalaman baru bagi bangsa Indonesia dan dampaknya dirasakan hingga sekarang.

Adapun jejak-jejak peninggalan kolonial Belanda yang masih bisa kita jumpai di Binongko adalah :

**a. Adanya jalan raya yang mengelilingi pulau Binongko.**

Kerja Rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkannya. Kompeni pandai menggunakan rodi ini untuk kepentingan sendiri. Rodi digunakan untuk segala macam keperluan seperti mendirikan pabrik dan jalan untuk pengangkutan barang dan sebagainya dan untuk pekerjaan lainnya bagi kepentingan pegawai kompeni. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Proses pekerjaan jalan di Binongko dilakukan oleh masyarakat Binongko ketika tanam paksa (kerja rodi) dalam bahasa Binongko disebut hardinsi (Herendiest dalam bahasa Belanda). Jalan yang dibuat sepanjang Pulau Binongko yaitu sekitar 47 km. Selain masyarakat Binongko yang mengerjakan jalan di Binongko, ada juga sebagian masyarakat Binongko yang dikirimkan ke tambang aspal di Kabungka untuk dipekerjakan disana pada waktu itu.

Alasan Belanda membuat jalan di Binongko yaitu karena Binongko merupakan jalur yang menuju ke pusat rempah-rempah di Maluku. Dan alasan lain yaitu untuk mempermudah kekuasaan Belanda di Binongko, karena dengan membuat jalan bangsa Kolonial bisa lebih mudah menguasai daerah ini. Jalan ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan ke- 33 Muhammad Asyikin yaitu sekitar tahun 1906.

Jaringan jalan di kota Buton berkembang ketika pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah pada tahun 1906. Jaringan jalan di Buton di buka dari Baubau ke Kapontori dan Kamaru sejauh 96 km. Jaringan jalan dari Baubau ke Sampolawa 50 km. Kemudian dari Baubau ke Kao-kaongke 76 km. Jurusan Banabungi ke Wakoko dan Kao-Kaongke jalan dibangun sepanjang 26 km, sedangkan jalur jalan dari Wakoko-Bonto sepanjang 8 km. Jalan lain yang dibangun adalah ke daerah pertambangan aspal di Lawele.

Dampak dari kebijakan ini adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas kota terutama jalan dan meningkatnya ekonomi pemerintah Hindia Belanda dan

penguasa pribumi dalam bentuk pajak. Dengan demikian terjadi aliansi antara pemerintah Hindia Belanda dengan penguasa lokal. Berbagai jenis pajak yang diperoleh dari pembangunan fisik wilayah hanya dibagi oleh kedua penguasa.

Setelah Belanda secara de facto mulai menguasai Buton pada tahun 1906 di masa Sultan Buton ke-33 Muhammad Asyikin Adilirrahim (1906-1911), Belanda mulai mengadakan jabatan baru, yaitu: Kepala Distrik. Jabatan Kepala Distrik tidak termasuk aparat Kesultanan tetapi merupakan pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Karena itu mereka diberi gaji antara Rp.30 – Rp.50 per bulan, sesuai jumlah penduduk dalam wilayah masing-masing. Tugas utama para Kepala Distrik itu adalah menarik pajak dari rakyat. (Majalah Wolio Molagi, 1999: 40)

Distrik Binongko dikepalai oleh La Ode Palisu dengan gaji sebulan sebesar Rp. 30,-. Penarikan pajak dari pada mulanya dilaksanakan mendapat tantangan amat keras dari masyarakat Binongko karena melihat kondisi masyarakatnya yang sebagian besar tidak memiliki cukup uang untuk membayar pajak dan memiliki tanah yang tandus. Dalam pengerjaan jalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak masyarakat Binongko yang meninggal pada saat pengerjaan jalan. Akhirnya sedikit demi sedikit para pekerja berkurang dan pengerjaan jalan pun terhambat.

Dalam penyempurnaan aparat pemerintahan dan administrasi pemerintahan di Buton, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang terdiri dari beberapa kampung atau kadie dan sebagai seorang kepala diangkat dari mereka yang berasal dari bangsawan, dengan diberikan gaji sebulan menurut besarnya wilayah tersebut. Pembentukan distrik-distrik ini pada masa Sultan ke- 33 Muhammad Asyikin (1906-1911). Kepala distrik bertugas memungut pajak kepada setiap masyarakat. Namun pajak yang diharuskan kepada masyarakat Binongko ini membuat masyarakat Binongko semakin terpuruk. Seperti menjadi pembantu di dalam rumah sendiri dan harus membayar sewa.

**a. Adanya uang Belanda**

Adanya alat pembayaran barang-barang yang bernama uang itu telah memudahkan anggota masyarakat sesuai apa yang mereka butuhkan. Beberapa sarjana telah memberikan definisi mengenai uang tersebut. Kita ambil diantaranya definisi Robertson yaitu: “money is something which is widely accepted in payments for goods” artinya uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. (Majalah Wolio Molagi, 1999: 39)

Menurut A.M Zahari (1977: 67), sejak masa pemerintahan Sultan ke-4 Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615), mata uang *Kampua* berlaku bersama-sama dengan mata uang VOC (Belanda) berdasarkan perjanjian Buton-VOC, antara Sultan Dayanu Ikhsanuddin dengan Appolosius Schot, pada tanggal 5 Januari 1613 di Buton. Salah satu point dalam perjanjian itu adalah: “Pemasukan uang logam oleh Kompeni yang berlaku pula di dalam kerajaan Buton sebagai mata uang yang sama nilainya dengan uang kerajaan sendiri (kampung)”. Uang Belanda inilah yang digunakan oleh masyarakat Binongko pada saat itu. Masyarakat Binongko menggunakan uang Belanda ini untuk membayar pajak dan untuk hidup sehari-hari. Setelah zaman pendudukan Jepang, uang Belanda tersebut tidak digunakan lagi.

Uang yang didapatkan sebagai bukti adalah uang yang dikeluarkan pada tahun 1918 dan tahun 1929. Namun kemungkinan pembayaran pajak pada tahun-tahun yang lalu adalah uang yang dikeluarkan sebelum uang yang didapatkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat Binongko pada masa Kolonial Belanda yaitu Kondisi masyarakat Binongko sangat terpuruk pada masa itu, untuk menghindari kekejaman tentara Belanda itu sebagian orang menyingkir ke tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain yang dianggap aman. Seperti halnya para korban perang yang mencari tempat aman untuk menyambung hidup. Saat itu banyak orang Binongko yang berhijrah ke NTT, NTB, Maluku, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung maupun ke Banda Naira. Demi menyambung hidup, orang-orang Binongko rela meninggalkan tanah kelahirannya.
2. Jejak-jejak Kolonial Belanda di Binongko, yaitu:
  - a) Adanya jalan raya yang mengelilingi pulau Binongko. Proses pekerjaan jalan ini dikerjakan oleh masyarakat Binongko pada saat kerja paksa atau kerja rodi, orang Binongko menyebutnya dengan nama *Hardinsi*.
  - b) Adanya uang Belanda yang digunakan pada masa kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1957. *Nasionalisme Asia*. Jakarta: Prapanca.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Majalah Wolio Molagi Edisi III, tahun 1999.
- Rabani, La Ode. 2010, *Kota-kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Rahman Hamid, Abdul dan Muhammad Saleh Madjid. 2011, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ricklefs, M.C. 2007, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Risal. 2009, *Dampak Perjanjian Asyikin-Brugman 1906 terhadap Kesultanan Buton, skripsi Baubau: FKIP Unidayan*.
- Rubli. 1998, *Dampak Perjanjian Antara La Elangi Sultan Dayanu Ikhsanuddin dengan Komandeur Appoloniuss Schoot tahun 1613 terhadap eksistensi Kesultanan Buton, skripsi Baubau: FKIP Unidayan*.
- Schoorl, Pim. 2003, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, Jakarta: Penerbit Djembatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV.
- Soekanto, S. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono, 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahari, A.M dkk. 1977, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhdi, Susanto. 2010, *Sejarah BUTON Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.